

Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini

The Islamic Economic System in the Abbasid Period and Its Potential in Today's Economy

Dieke Husna Kamilla

Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung (40154) Jawa Barat - Indonesia

*Pos-el: diekehusnakamilla@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem ekonomi masa Abbasiyah dengan potensi ekonomi masa kini, dengan tujuan menggali pembelajaran dari masa lalu dan mengidentifikasi relevansi serta aplikabilitasnya dalam konteks ekonomi modern. Masa Abbasiyah pada periode pertama, yang dipimpin oleh khalifah-khalifah seperti Al-Manshur, Al-Mahdi, dan Harun Al-Rasyid, memiliki karakteristik ekonomi yang berfokus pada sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber sejarah dan literatur akademik untuk memahami sistem ekonomi masa Abbasiyah. Penulis meneliti langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Abbasiyah dalam meningkatkan sektor-sektor ekonomi tersebut, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan irigasi, dan pembiayaan riset ilmiah. Selanjutnya, penulis melihat potensi ekonomi masa kini dengan penerapan yang diharapkan dari ekonomi islam masa abassiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat terdapat nilai yang dapat dipetik dari ekonomi islam masa abassiyah dengan potensi ekonomi masa kini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang potensi penerapan pembelajaran dari masa Abbasiyah dalam konteks ekonomi modern. Relevansi dari sistem ekonomi islam masa Abbasiyah terletak pada kebijakan yang pro-rakyat, dukungan terhadap sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan, dan perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan pentingnya mengadopsi pendekatan yang holistik dalam merancang kebijakan ekonomi masa kini. Menggabungkan elemen-elemen positif dari sistem ekonomi masa Abbasiyah, seperti perlindungan hak-hak rakyat,

diversifikasi sumber pendapatan, dan peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: sistem ekonomi islam, masa Abbasiyah, potensi ekonomi, pembelajaran masa lalu, konteks ekonomi masa kini.

***Abstract.** This study aims to compare the economic system of the Abbasid era with today's economic potential, with the aim of exploring lessons from the past and identifying its relevance and applicability in the context of a modern economy. The Abbasid period in the first period, which was led by caliphs such as Al-Mansur, Al-Mahdi, and Harun Al-Rashid, had economic characteristics that focused on agriculture, mining and trade. In this study, the authors collect data from historical sources and academic literature to understand the economic system of the Abbasid period. The author examines the steps taken by the Abbasid government in improving these economic sectors, such as infrastructure development, irrigation improvements, and financing of scientific research. Furthermore, the author looks at the current economic potential with the expected application of the Islamic economics of the Abassiyah period. The results of this study indicate that there is value that can be drawn from the Islamic economics of the Abassiyah period with today's economic potential. This research provides insight into the potential application of learning from the Abbasid period in the context of a modern economy. The relevance of the Islamic economic system during the Abbasid era lies in pro-people policies, support for economic sectors that encourage growth, and attention to the development of science. As a suggestion, this study recommends the importance of adopting a holistic approach in designing current economic policies. Combining the positive elements of the economic system under the Abbasids, such as protecting people's rights, diversifying income sources, and increasing investment in research and development, can promote sustainable and inclusive economic growth.*

Keywords: Islamic economic system, Abbasid period, economic potential, past lessons, present economic context.

PENDAHULUAN

Kata "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "oikos" yang berarti "rumah" dan "nomos" yang berarti "aturan". Artinya adalah aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia dalam rumah tangga, baik dalam skala rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas, yang dijalankan dalam kerangka syariah. Ilmu ini mempelajari perilaku seorang Muslim dalam masyarakat Islam yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Namun, definisi ini memiliki kelemahan

karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Definisi semacam ini membatasi seseorang untuk membuat keputusan yang apriori, di mana benar atau salah harus diterima tanpa pertimbangan lebih lanjut.

Definisi yang lebih lengkap harus mencakup beberapa prasyarat, termasuk karakteristik pandangan hidup Islam. Salah satu persyaratan utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan syariah.

Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya "Teori Mikro Ekonomi", ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dari perspektif nilai-nilai Islam. Sementara menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya "Listiawati", ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis pada ketuhanan, di mana sistem ini berlandaskan pada ajaran Allah, memiliki tujuan akhir yang mengarah kepada Allah, dan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Allah. Sistem ekonomi pada masa Bani Abbasiyah merupakan salah satu periode bersejarah yang menggambarkan kekayaan dan kemakmuran yang mencapai puncaknya dalam sejarah dunia Islam. Masa Bani Abbasiyah, yang berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-13, menandai masa keemasan peradaban Islam dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi.

Selama periode ini, sistem ekonomi Bani Abbasiyah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mendasar, seperti adil, keadilan, kebebasan berdagang, dan pembagian yang merata. Pedoman utama bagi sistem ekonomi ini adalah prinsip-prinsip syariah, yang menjamin kebebasan individu

untuk berdagang dan mempertahankan harta mereka dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran agama. Selama masa Bani Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat perdagangan dan pertukaran intelektual yang sangat penting. Kota ini menjadi titik pertemuan untuk pedagang dari Timur dan Barat, yang membawa barang-barang berharga seperti sutra, rempah-rempah, permata, dan barang dagangan lainnya. Sistem ekonomi yang berkembang pada saat itu memungkinkan pasar bebas berkembang dengan adanya jaminan keamanan bagi pedagang dan perlindungan hak milik.

Sejarah mencatat bahwa sebelum dinasti Abbasiyah ada dinasti Umayyah, yang mengalami banyak perubahan dalam berbagai bidang dibandingkan dengan masa permulaan Islam. Pada masa dinasti Umayyah, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, tetapi bidang ekonomi mengalami perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan masa dinasti Abbasiyah. Misalnya, pada masa dinasti Abbasiyah, sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap keuangan negara, dan dinasti ini memberikan keringanan kepada petani. Di masa dinasti Umayyah, petani dikenakan pajak yang berat dan tidak disikapi dengan simpati, sehingga sektor pertanian tidak berkembang dan tidak memberikan kontribusi yang diharapkan. Selama dinasti Umayyah, terjadi pemborosan uang yang besar untuk mempertahankan status quo para pemimpin.

Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang berlangsung dari tahun 132 H/750 M hingga 657 H/1075 M dan mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, ekonomi, kekayaan, dan kekuasaan. Pada masa ini, muncul berbagai disiplin ilmu yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dalam ratusan hingga ribuan buku.

Dinasti Abbasiyah memiliki wilayah yang luas, dengan pilar-pilarnya yang solid dan sistem peradabannya yang tinggi. Wilayahnya mencakup daratan China di

Timur hingga Selatan Perancis, termasuk Andalusia, yang semuanya diwarisi dari dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah berhasil merebut wilayah-wilayah tersebut dari dinasti Umayyah melalui strategi yang matang, analisis yang profesional, dan studi yang integral.

Pada dasarnya, dinasti Abbasiyah menganut Islam dan menerapkan hukum positif Islam. Sebagai negara Islam, dinasti Abbasiyah bertujuan menjalankan aturan Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta membangun perekonomian negara untuk mencapai kemakmuran yang merata bagi masyarakat.

Dinasti Abbasiyah memiliki filosofi kuat untuk mewujudkan masyarakat yang merata dan makmur. Oleh karena itu, mereka menyerahkan pembangunan ekonomi kepada orang-orang terdidik dan ahli di bidang ekonomi. Mengatur kehidupan seluruh rakyat dalam wilayah yang sangat luas bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai kemakmuran. Pada masa dinasti Abbasiyah, terjadi kemajuan perdagangan dan industri yang pesat. Kota-kota seperti Baghdad, Bashrah, dan Aleksanderiah menjadi pusat bisnis pada masa itu. Pedagang Muslim mengangkut barang dagangan ke luar negeri dan mendatangkan barang dari luar, yang kemudian diangkut ke ibu kota. Industri berkembang pesat, termasuk industri perhiasan, permadani, sutera, dan berbagai jenis pakaian.

Selain itu, pertanian juga mendukung kemajuan ekonomi pada masa itu. Khalifah Abbasiyah memberikan perhatian besar pada sektor pertanian karena menyadari bahwa pertanian adalah sektor yang paling penting dan produktif dalam ekonomi manusia. Mereka membangun sistem irigasi yang memadai dan meningkatkan status penduduk petani. Konsep ekonomi yang diaktualisasikan oleh dinasti Abbasiyah sesuai dengan pandangan para sarjana ekonomi Islam, di mana sektor pertanian dan

perdagangan menjadi sektor ekonomi yang penting.

Selain sektor-sektor ekonomi tersebut, dinasti Abbasiyah juga mengelola sumber-sumber keuangan negara lainnya seperti sedekah, zakat, al-Jizyah, al-Fa'I, al-Ghanimah, dan lain-lain secara profesional. Semua ini berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada masa itu.

Potensi sistem ekonomi pada masa Bani Abbasiyah masih relevan dalam konteks ekonomi masa kini. Prinsip-prinsip Islam yang diterapkan pada saat itu, seperti keadilan, pembagian yang merata, dan kebebasan berdagang, tetap memiliki nilai dan dapat menjadi panduan bagi sistem ekonomi modern. Konsep keadilan dalam distribusi kekayaan, perlindungan hak-hak individu, dan upaya mewujudkan pemerataan ekonomi masih menjadi isu yang relevan dan penting dalam konteks ekonomi global saat ini.

Dengan mengkaji sistem ekonomi pada masa Bani Abbasiyah, kita dapat mempelajari prinsip-prinsip yang sukses diterapkan pada saat itu dan mencari cara untuk mengadaptasinya dalam rangka mencapai kemakmuran dan keadilan ekonomi pada masa kini. Melalui pemahaman sejarah ekonomi, kita dapat mengeksplorasi potensi sistem ekonomi masa lalu yang mungkin dapat memberikan wawasan berharga dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan pencarian melalui buku, jurnal ilmiah, laporan riset, artikel, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti.

Dalam konteks penelitian mengenai Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini, peneliti melakukan pencarian literatur yang berfokus pada periode waktu tersebut. Sumber-sumber literatur tersebut dapat mencakup karya sejarah, tulisan akademis, analisis ekonomi, laporan pemerintah, dan sumber-sumber lain yang memberikan informasi penting tentang perkembangan ekonomi Jepang pada masa tersebut.

Meskipun metode studi literatur tidak melibatkan pengumpulan data primer, metode ini tetap memiliki nilai penelitian yang signifikan dalam konteks penelitian ini. Melalui analisis kritis terhadap literatur yang relevan, peneliti dapat mengidentifikasi Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini

Dengan demikian, metode penelitian studi literatur memberikan kontribusi yang berharga dalam mengeksplorasi dan memahami perkembangan ekonomi Jepang di Era Showa, khususnya dalam konteks Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinasti Bani Abbasiyah berdiri dengan tujuan melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah, dan dinamakan "Bani Abbasiyah" karena pendiri dan penguasa dinasti tersebut berasal dari keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas adalah pendiri dinasti ini, yang berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 M. Pusat pemerintahan yang awalnya berada di Damaskus dipindahkan ke Baghdad setelah berdirinya dinasti Abbasiyah.

Keberhasilan kaum yang menginginkan berdirinya khilafah Bani Abbasiyah disebabkan oleh kemampuan

mereka dalam menyadarkan kaum Muslim bahwa Bani Abbasiyah memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka berjanji untuk menerapkan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul serta mengamalkan syariat Allah. Dasar pemerintahan Bani Abbasiyah dibangun oleh Abu Al Abbas dan Abu Ja'far Al-Manshur, dan puncak keemasan dinasti ini terjadi pada masa pemerintahan tujuh khalifah, antara lain Al-Mahdi (775–785 M), Al-Hadi (775–786 M), Harun Al-Rasyid (786-809 M), Al-Ma'mun (813–833 M), Al-Mu'tashim (833-842 M), Al-Wasiq (842-847 M), dan Mutawakkil (847-861 M)

Khalifah Al Manshur (714-775 M)

Selama masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, terutama pada periode pertama di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Manshur, terdapat beberapa tradisi dan praktik ekonomi yang berkontribusi terhadap kemakmuran masyarakat dan perkembangan ekonomi negara. Beberapa tradisi dan praktik ekonomi tersebut antara lain:

1. Pemandahan Pusat Pemerintahan: Khalifah Al-Manshur memindahkan pusat pemerintahan dari Hasyimiyah ke kota Baghdad yang baru dibangunnya. Pemandahan ini berdampak positif pada perkembangan ekonomi karena Baghdad menjadi pusat perdagangan dan pertukaran informasi yang penting.
2. Konsolidasi Administrasi Birokrasi: Khalifah Al-Manshur melakukan konsolidasi dan penertiban administrasi birokrasi negara. Hal ini membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam mengelola urusan ekonomi dan keuangan.
3. Pengangkatan Wazir: Al-Manshur mengangkat seorang wazir sebagai koordinator departemen dalam pemerintahan. Wazir memiliki peran penting dalam mengelola kebijakan ekonomi dan keuangan negara serta mengawasi administrasi pemerintahan secara umum.
4. Pembentukan Lembaga Negara: Khalifah Al-Manshur membentuk lembaga protokol

negara, sekretaris negara, kepolisian negara, serta membenahi angkatan bersenjata dan membentuk lembaga kehakiman negara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.

5. Peran Jawatan Pos: Khalifah Al-Manshur meningkatkan peranan jawatan pos dalam mengendalikan harga-harga. Para kepala jawatan pos diperintahkan untuk melaporkan harga pasar dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Hal ini membantu dalam mengendalikan inflasi dan memastikan harga-harga tetap stabil.

6. Kedisiplinan Keuangan Negara: Al-Manshur sangat berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menempatkan penekanan pada peneguhan kedudukan keuangan negara dan mengurangi pemborosan. Tindakan ini termasuk membatasi penggunaan dana Baitul Mal untuk kepentingan pribadi atau politik, sehingga keuangan negara menjadi lebih stabil.

Dengan adanya upaya ini, Daulah Abbasiyah mampu mencapai kemakmuran pada masa tersebut. Permasalahan ekonomi dan keuangan negara menjadi fokus bagi para khalifah berikutnya, sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat dapat terjamin dan perkembangan ekonomi berlanjut.

Khalifah Al-Mahdi (775–785 M)

Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur: Al-Mahdi melaksanakan pembangunan tempat persinggahan untuk para musafir haji serta pembuatan kolam air dan perbaikan serta peningkatan jumlah telaga dan perigi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keberlangsungan perjalanan

para musafir serta memperbaiki sistem penyediaan air bagi para kafilah dagang.

2. Peningkatan Sektor Pertanian: Al-Mahdi mengeluarkan kebijakan yang mendukung sektor pertanian. Hal ini termasuk memberikan peringanan pajak hasil bumi kepada petani, perlindungan hak milik dan keselamatan jiwa petani, serta melakukan perluasan lahan pertanian di berbagai daerah. Pembangunan bendungan dan kanal juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi irigasi dan peningkatan hasil pertanian.

3. Peningkatan Sektor Pertambangan: Pemerintahan Al-Mahdi mendorong peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Hal ini memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian negara.

4. Peningkatan Sektor Perdagangan: Jalur transit perdagangan antara Timur dan Barat menjadi sumber kekayaan bagi Daulah Abbasiyah. Pelabuhan Basrah menjadi penting dalam aktivitas perdagangan. Pemerintah mendukung sektor perdagangan dengan membuat sumur-sumur, membangun tempat peristirahatan untuk para kafilah dagang, mendirikan armada dagang, serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai.

Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produksi pertambangan, dan mendorong aktivitas perdagangan. Dengan adanya kebijakan ini, perekonomian negara Abbasiyah mengalami peningkatan dan kemakmuran masyarakat tercapai.

Khalifah Harun Al-Rasyid (786-809 M)

Pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid (70-193 H), Daulah Abbasiyah mencapai puncak kemakmurannya dan terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat. antara lain:

1. Pembentukan Baitul Mal: Khalifah Harun Al-Rasyid membangun Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurus keuangan negara. Di bawah Baitul Mal, terdapat beberapa diwan yang bertugas mengatur keuangan, antara lain

Diwan al-Khazanah (mengurus perbendaharaan negara), Diwan al-Azra' (mengelola kekayaan negara berupa hasil bumi), dan Diwan Khazain Al-Silah (mengurus perlengkapan angkatan perang).

2. Sumber Pendapatan Negara: Pemerintahan ini mengandalkan berbagai sumber pendapatan, termasuk kharaj (pajak atas tanah yang dimiliki non-Muslim), jizyah (pajak yang dikenakan pada non-Muslim sebagai pengganti kewajiban militer), zakat (pajak berbasis agama yang dikenakan pada umat Muslim), fai (pajak yang dikenakan pada hasil produksi pertanian), ghanimah (harta rampasan perang), usyr (pajak perdagangan), serta harta lainnya seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris.

3. Alokasi Dana Baitul Mal: Pendapatan yang masuk ke Baitul Mal dialokasikan untuk berbagai keperluan seperti riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani, biaya pertahanan, dan anggaran rutin pegawai. Selain itu, dana juga digunakan untuk membiayai kebutuhan para tahanan, termasuk penyediaan makanan dan pakaian sesuai dengan musim.

Khalifah Harun Al-Rasyid juga memberikan perhatian terhadap masalah perpajakan. Ia menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan yang berlandaskan syariah, yang dikenal sebagai "Kitab al-Kharaj". Pemungutan pajak kharaj dilakukan melalui tiga cara, yaitu penaksiran luas tanah dan jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam bentuk uang, penetapan persentase tertentu dari hasil yang diperoleh, serta penetapan pajak hasil bumi bagi para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dan yang bersangkutan.

Khalifah Al-Ma'mun (813–833 M),

Al-Ma'mun sangat mencintai ilmu pengetahuan, dan dalam masa pemerintahannya, ia memberikan perhatian besar pada pengembangan ilmu pengetahuan

dalam Islam. Ia mendorong aktifitas penerjemahan buku-buku asing dan mengalokasikan dana dari Baitul Mal untuk gaji para penterjemah. Al-Ma'mun juga mendirikan sekolah-sekolah, termasuk Baitul Hikmah yang terkenal, yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dan dilengkapi dengan perpustakaan besar. Pada masa ini, Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Namun, setelah melewati periode tersebut, Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran dan akhirnya dihancurkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 M.

Potensi Ekonomi Masa Kini

Potensi ekonomi Islam masa kini dapat dilihat dari pengaruh sistem ekonomi masa Abbasiyyah yang berfokus pada prinsip-prinsip Islam.

1. Perdagangan: Sistem perdagangan yang berkembang pada masa Abbasiyyah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi mereka. Mereka mengembangkan jaringan perdagangan yang luas, termasuk melalui jalur darat dan laut, serta memperkenalkan konsep perbankan Islam seperti al-wakalah (surat kuasa) dan al-sarf (pertukaran mata uang). Potensi perdagangan Islam masa kini dapat dilihat dalam perkembangan perbankan syariah, keuangan Islam, dan perdagangan internasional yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam.
2. Inovasi dan Kreativitas: Masa Abbasiyyah dikenal sebagai periode keemasan ilmu pengetahuan dan inovasi dalam dunia Islam. Para ilmuwan dan peneliti Muslim pada masa itu membuat penemuan-penemuan penting dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik. Potensi ekonomi Islam masa kini juga bergantung pada inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti halal, etis, dan berkelanjutan.

3. Kewirausahaan: Masa Abbasiyyah melihat kemunculan kelas pedagang dan pengusaha yang berperan penting dalam perekonomian mereka. Pengusaha Muslim pada masa itu berperan dalam memperluas perdagangan dan memberikan lapangan kerja. Potensi kewirausahaan Islam masa kini dapat dilihat dalam pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti musharakah (kemitraan) dan mudarabah (modal berisiko).
4. Pertanian dan Irigasi: Pada masa Abbasiyyah, sektor pertanian berkembang melalui penggunaan irigasi yang efektif. Potensi ekonomi ini masih relevan pada masa kini, di mana pertanian modern dan pengelolaan air yang baik dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan keberlanjutan pangan. Sumbernya meliputi sistem irigasi yang canggih, pengembangan teknologi pertanian, dan perluasan lahan pertanian.
5. Sistem Perpajakan: Pada masa Abbasiyyah, sistem perpajakan seperti kharaj, jizyah, dan zakat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Potensi ekonomi pada masa kini meliputi sistem perpajakan yang efektif dan adil untuk mendapatkan pendapatan negara. Sumbernya mencakup peraturan perpajakan yang baik, peningkatan administrasi perpajakan, dan pemberantasan korupsi.

SIMPULAN DAN SARAN

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis pada ketuhanan, di mana sistem ini berlandaskan pada ajaran Allah, memiliki tujuan akhir yang mengarah kepada Allah, dan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Allah. Sistem ekonomi pada masa Bani Abbasiyyah merupakan salah satu periode bersejarah yang menggambarkan kekayaan dan kemakmuran yang mencapai puncaknya dalam sejarah dunia

Islam. Masa Bani Abbasiyyah, yang berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-13, menandai masa keemasan peradaban Islam dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk system ekonomi masa Abbasiyyah pada periode pertama memiliki beberapa karakteristik yang penting. Pemerintah Abbasiyyah, di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah seperti Al-Manshur, Al-Mahdi, dan Harun Al-Rasyid, mengambil berbagai langkah untuk memperkuat ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada periode tersebut, pemerintah Abbasiyyah mengadopsi kebijakan yang mendukung sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Mereka memperbaiki infrastruktur irigasi, membangun tempat peristirahatan dan sarana transportasi bagi para pedagang, dan menjaga keamanan pelabuhan dan jalur perdagangan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, memperluas perdagangan, dan mengumpulkan pendapatan negara dari berbagai sumber seperti pajak, zakat, dan hasil bumi.

Penulis menyadari meskipun tidak ada sumber tertentu yang dapat penulis berikan, para peneliti dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengeksplorasi lebih lanjut tentang dampak sistem ekonomi masa Abbasiyyah terhadap kesejahteraan masyarakat, peran perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa tersebut.

Selain itu, peneliti lain dapat melihat perbandingan antara sistem ekonomi masa Abbasiyyah dengan sistem ekonomi masa kini. Dengan menganalisis perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem ini, peneliti dapat memberikan saran dan rekomendasi mengenai bagaimana pengalaman dan pembelajaran dari masa Abbasiyyah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern untuk mencapai pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas.

Namun, penting untuk menyadari bahwa penelitian lebih lanjut dan kajian mendalam diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem ekonomi masa Abbasiyah dan potensi ekonomi masa kini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbasiyah. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(2), 72–77.
- Al-Hassan, A. Y. (2001). *Islamic Science and Engineering*. World Scientific Publishing Co.
- Ali. (1996). *Sejarah Islam (Tarikh Pramoderen)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata.
- Arif, M. Nur Rianto Al dan Euis Amalia, (2010). *Teori Mikroekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*.
- Basyir, A. A. (1993). *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*.
- Daulay, Haidar Putra, dkk. (2020). *Masa Keemasan Dinasti Umayyah dan Dinasti*
- Fazlurrahman. (1967). *Implementation of the Islamic Concept of State of Fakistan Milleu. (1949). (Pakistan :Islamic Studies)*
- Fildayanti, D. A. (2021). *Konsep Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani*.
- Gusfahmi. (2007). *Pejak Menurut Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hassan, K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Huda, M. N. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah*. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135-148.
- Ibrahim Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Tasyri' al- Siyasi*, (Kairo :Maktabah Nahdhatul
- Ihsan, N. A. (2022). *Konsep Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah*.
- Indasari, D. (2017). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni*, 9(2), 55-60.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice (2nd ed.)*. John Wiley & Sons.
- Juneidi. B.SM. (1991). *Islam dan Entrepreneurisme, (Suatu Studi Fiqh Ekonomi, Bisnis Moderen)*,
- Khan, I., & Mohammad, R. (2016). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 33(1), 64-78.
- Klasik, B. U. (2021). *PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM ERA KLASIK (BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH)*.
- Meriyati. (2018). *Perkembangan Ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah*. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 45–56.
<https://doi.org/10.4337/9781849805957.00031>
- Muhammad Sayyid al-Wakil. (1998). *Wajah Dunia Islam dari Dinasti Muawiyah sampai Imperialisme Moderen*, terj. Fadhli Bahri, (Jakarta : Pustaka al-Kausar)
- Nasution, S. (2013). *sejarah peradaban Islam*

- Puspita, A. (2022). resume *KONSEP EKONOMI PADA MASA BANI Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani*.
- Saprida, M. H. I. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Prenada Media.
- Sulaiman, S. (2021). Sistem Ekonomi Dinasti Abbasiyah (Tinjauan Historis Pada Masa Pemerintahan Khalifah Al-Mansur 95 H-159 H/714 M-775 M).
- Yuliadi, I. (2001). Ekonomi Islam Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI).